

PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (Studi Kasus pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Kota Bandung)

Siska Herlita¹,

siska.herlita@widyatama.ac.id

Prodi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyatama

Bunga Indah Bayunitri²

Prodi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyatama

Email :

bunga.indah@widyatama.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Kota Bandung. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah pengendalian internal sebagai variabel independen. Sedangkan pencegahan kecurangan sebagai variabel dependen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Kota Bandung yang berjumlah 108 orang. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik non probability sampling dengan purposive sampling. Sedangkan jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 85 orang karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Kota Bandung. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana pada taraf signifikansi sebesar 5%. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Ver.22.00. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Kota Bandung. Besarnya pengaruh pengendalian internal dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap pencegahan kecurangan sebesar 55%.

Kata Kunci : Pengendalian Internal, Pencegahan Kecurangan

1. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta (besar-kecil, domestik-asing) dan koperasi, yang merupakan perwujudan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan

secara bertahap dan berkelanjutan. Sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi, keberadaan BUMN memiliki peran yang tidak kecil guna ikut mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 (Mimin, 2015).

Seiring dengan semakin berkembangnya perusahaan, maka kegiatan dan masalah yang dihadapi perusahaan akan semakin kompleks sehingga semakin sulit untuk mengawasi seluruh kegiatan operasi perusahaan, dan semakin besar kemungkinan terjadinya fraud (kecurangan) (Suginam, 2017).

Sistem kerja yang tidak transparan (terbuka) merupakan peluang emas bagi pelaku kecurangan. Kecurangan dengan cara meyasati sistem justru dimungkinkan karena pelaku adalah “orang dalam” atau melibatkan orang yang memiliki otoritas atas sistem tersebut. Sistem yang tidak transparan menutup kesempatan bagi banyak orang untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan terhadap sistem yang sedang berjalan (Kumaat, 2011:158).

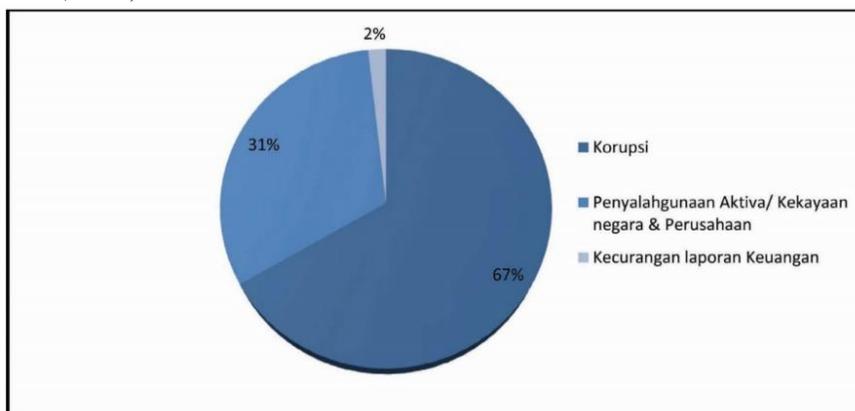
Kecurangan adalah tindakan melanggar hukum yang merugikan entitas/organisasi dan menguntungkan pelakunya. Tindakan kecurangan ini dapat berupa pengambilan atau pencurian harta atau aset organisasi. Pelaku kecurangan dapat dari dalam atau dari luar organisasi dan dapat dilakukan oleh manajemen atau karyawan. Kecurangan (*fraud*) bukan saja berakibat berkurangnya aset organisasi tetapi juga dapat mengurangi reputasi. Tindakan *fraud* dapat dikurangi melalui langkah-langkah pencegahan atau penangkalan, pendeteksian, dan investigasi. Langkah pencegahan terhadap *fraud* tidaklah mudah, *fraud* sulit dideteksi karena pada hakekatnya *fraud* tersembunyi dan pelakunya pada umumnya cerdas, pekerja keras, dan mempunyai profil seperti orang jujur serta sedikit catatan kriminal (Karyono, 2013:1).

Menurut *Examination Manual* (2006) dari *Association of Certified Fraud Examiner* yang dikutip oleh Karyono (2013:17), *fraud* terdiri atas empat kelompok besar yaitu kecurangan laporan keuangan (*fraudulent statement*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), korupsi (*corruption*) dan kecurangan yang berkaitan dengan komputer. Tindakan *fraud* cenderung meningkat oleh karena itu upaya pencegahan harus didukung oleh seluruh organisasi baik para manajer maupun seluruh karyawan. Di lingkungan organisasinya juga harus tercipta suasana kerja yang kondusif dalam menangkal *fraud* dari segi pengendalian internal, sistem penggajian, dan sistem penghargaan terhadap kinerja dan prestasi kerja. Segala bentuk kecurangan yang terdeteksi harus segera ditindaklanjuti secara tuntas tanpa pandang bulu siapa pelakunya agar mempunyai daya kerja *prevention* (mencegah).

Menurut Dr. Donald Cressy dalam Karyono (2013:8) penyebab terjadinya kecurangan dapat dipengaruhi oleh tiga kondisi yaitu terdiri dari tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*) ketiga kondisi ini disebut sebagai segitiga kecurangan (*fraud triangle*). Faktor pertama yaitu pembenaran (*pressure*) adalah tekanan dari pihak manajemen untuk melakukan kecurangan yang terjadi pada karyawan dan manajer, kemudian faktor kedua adalah kesempatan (*opportunity*) yang berarti terdapat situasi untuk melakukan kecurangan serta timbul karena lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan, faktor ketiga adalah pembenaran (*rationalization*) yaitu pelaku menganggap bahwa perbuatannya masih dapat diterima dan merupakan hal biasa yang dilakukan oleh orang lain juga.

Menurut Undang-Undang No 19 tahun 2003 mendefinisikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibagi menjadi dua yaitu perusahaan perseorangan (perseroan) dan perusahaan umum (perum). Perserusahaan perseorangan adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya yang seluruh atau paling sedikit 51 persen sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Sedangkan perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. (Kemenkeu, 2003).

Bersarkan hasil survai yang dilakukan oleh ACFE Indonesia, Fraud paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi. Sebanyak 154 responden survai fraud Indonesia atau sebesar 67% memilih korupsi. Hal ini berbeda dengan hasil Report to The Nation (2016) yang dikeluarkan oleh ACFE yang menyatakan bahwa jenis fraud ditemukan dalam bentuk asset misappropriation. Dalam Survai fraud Indonesia sendiri, asset misappropriation dipilih oleh 71 responden atau 31% dari jumlah responden. Fraud berupa laporan keuangan menjadi jenis fraud terbanyak lketiga dipilih oleh 4 responden atau sebanyak 2%. Perbedaan ini disebabkan oleh pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda dari responden. Hal ini disebabkan publikasi di masyarakat mengenai korupsi. (ACFE Indonesia, 2017)



Gabar Fraud Paling Banyak di Indonesia

Kasus yang terjadi di PT Dirgantara Indonesia, Bandung ([sindonews](#)). Lima karyawan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Pasalnya, mereka diduga mencuri dan menjual spare part pesawat secara ilegal. Lima karyawan PTDI tersebut antara lain, Agus Zaenudin dan Nanda Lesmana sebagai staf gudang; Mochamad Randenaswara sebagai staf umum, Dian Hardiansyah yang menjabat

sebagai supervisor quality inspection, dan Wawan Kriswana sebagai karyawan kontrak PTDI. Pada Kamis (3/10/2019), kelima karyawan PTDI tersebut menjalani sidang pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) di PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung. Jaksa penuntut umum (JPU) Luki membacakan kronologi kejadian. Luki mengatkaan, penjualan suku cadang pesawat milik PTDI itu dilakukan lima terdakwa antara Mei hingga September 2018 di Gudang CH, Gudang CG, dan Gudang Ex Repair PTDI. Kelima terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, berupa spare part pesawat terbang yang nilainya mencapai USD374.266,53 atau setara dengan Rp5.426.864.685. Dalam kurun waktu itu, kata Luki, kelima terdakwa mengeluarkan spare part pesawat dari tiga gudang tanpa melalui mekanisme yang tidak seharusnya. Spare part yang dikeluarkan ada 19 jenis, yaitu dual distributor, brake temperature indicator, valve steering preselect, junctuon box, anti skid control unit, roll trim actuator, dua unit inverter, system tets C/U, cargo door C/U, empat buah konektor, empat air speed indicator dan pressure transmitter untuk jenis pesawat NC212. (Agus, 2019)

Menurut Luki "perbuatannya itu dilakukan saat istirahat dan ketika ruangan sedang sepi. Untuk empat konektor yang disimpan di gudang CH, terdakwa Agus meminta bantuan Indra selaku staf gudang CG untuk mengambil spare part dengan imbalan Rp500 ribu untuk satu konektor. Indra menyanggupi permintaan itu lalu mengeluarkan empat konektor tanpa melalui mekanisme pengeluaran barang yang seharusnya". Sedangkan terdakwa Randenaswara, berperan sebagai penjual 18 konektor kepada pihak lain di luar yakni kepada Darmawan, Iwan, dan Beni dan mereka masuk dalam daftar pencarian orang (buron). Konektor tersebut dijual Randenaswara ke pihak luar dengan total nilai keseluruhan Rp429.500.000. Uang dari hasil penggelapan tersebut kemudian dibagikan oleh Randenaswara kepada Agus sebesar Rp358 juta. Sedangkan Randenaswara sendiri mendapat sisanya sebesar Rp71 juta. Adapun satu spare part berupa inverter untuk pesawat CN 235 dikeluarkan dari gudang CH tanpa melalui mekanisme seharusnya, yang melibatkan terdakwa Dian Hadiansyah. "Terdakwa Agus menyerahkan spare part inverter kepada terdakwa Dian Hadiansyah selaku supervisor quality inspection dengan imbalan Rp 45 juta" tutur Luki. Oleh terdakwa Dian, inverter itu diserahkan kepada Wawan Kriswana yang sebelumnya memesan dengan nilai Rp50 juta. "Kemudian, oleh Wawan selaku karyawan kontrak PTDI, suku cadang inverter untuk pesawat CN 235 tersebut dijual Rp 80 juta kepada Benny Sobarna," ungkap Luki (Agus, 2019).

Adapun barang milik PT DI yang digelapkan oleh para tersangka disebabkan karena kurangnya pemeriksaan secara berkala mengenai data jumlah persediaan yang tercatat dengan jumlah fisik yang ada dilapangan sehingga menjadi celah bagi para tersangka untuk mengambil dan memperjual belikan tanpa melalui standar operasional prosedur dan izin dari manajer PT DI (Lucky M. Lukman, 2019).

Kasus penjualan 19 unit suku cadang pesawat secara ilegal tersebut terbongkar setelah PTDI melakukan audit sesuai nota dinas nomor Nota/R/03a/PIOOOO/02/2019 tanggal 8 Februari. Isinya tentang laporan penilaian kerugian atas 19 suku cadang hilang yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pengawas Intern PTDI. Perbuatan kelima terdakwa diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana juncto Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana juncto Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana dengan pidana paling lama 5 tahun penjara," pungk

Luki.Dampak dari kasus pencurian 19 spare part pesawat tersebut perusahaan harus menanggung kerugian sebesar USD374.266,53 atau setara dengan Rp5.426.864.685. Sparepart yang dicuri tidak dapat kembali karena penadah masih dalam daftar pencarian orang, dan uang dari hasil penjualan sparepart juga tidak dapat dikembalikan kepada pihak perusahaan karena uangnya sudah dipakai oleh para pelaku (Reiny Dwinanda, 2019).

Masalah lainnya yang membelit PTDI menurut Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (PTDI) dan aparat penegak Hukum untuk turun dan menginvestigasi adanya dugaan tindak pidana korupsi di PT Dirgantara Indonesia (PT. DI) yang merugikan negara. Menurut Ketua Harian FSP BUMN Bersatu, Prakoso pun membeberkan dugaan kerugian negara di PTDI hingga saat ini karena kurangnya pengendalian internal yang berpotensi menyebabkan kerugian negara di PT. Dirgantara Indonesia sebesar Rp 8 miliar. Selain potensi kerugian negara sebesar Rp.8 miliar, perusahaan BUMN plat merah ini juga bakal terus merugi lantaran adanya kewajiban PTDI yang harus membayar denda akibat keterlambatan dalam pekerjaan. Dimana, pada audit BPK tahun 2015 ditemukan denda keterlambatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa di TNI AL (Ferry Hidayat, 2017).

Pada tahun 2011 kata Prakoso, TNI AL memberikan pekerjaan pengadaan Helikopter Bell.412EF tahap II dengan nilai Rp.220 Miliar oleh PT. Dirgantara Indonesia. Dalam pekerjaan ini, PT. Dirgantara sudah dibayar Rp.212.415.954.199 atau 96 persen. Tetapi pekerjaan atau kemajuan fisik baru 20 persen. Menurut Prakoso, dari kontrak pesawat terbang/helikopter yang berasal dari dana APBN untuk pemesanan helikopter beel 412 EP oleh kemenhan terdapat perbedaan penentuan imbalan (fee) kepada mitra penjualan PTDI, padahal helikopter yang dipesan sama dan pembeli yang sama, yaitu Kemenhan tetapi untuk pengguna yang berbeda, yaitu TNI AD dan TNI AL. PTDI memberikan fee kepada BTP sebesar 5 persen dari total kontrak Helikopter Beel 412EP beserta perlengkapannya untuk TNI AD. Tetapi PTDI memberikan fee kepada BTP sebesar 7 persen dari total kontrak Helikopter Beel 412EP beserta perlengkapannya untuk TNI AL. Akibat keterlambatan tersebut denda yang harus dibayar oleh PT. DI sebesar Rp 3.357.999.942. Pada saat yang sama TNI AU juga memesan helikopter Super Puma untuk memenuhi rencana strategis (renstra) pertahanan tahun 2009-2014. Tetapi realisasinya, TNI AU baru menerima sembilan dari 16 unit helikopter Super Puma yang dipesan. Lebih lanjut, Prakoso mengatakan walau TNI AU hanya menerima sembilan Helikopter super puma dari 16 unit yang dipesan, tapi pengiriman tidak tepat waktu sehingga mengganggu proses operasional. Sedangkan sisa 7 unit lagi dibiarkan saja oleh TNI AU (Ferry Hidayat, 2017).

Dilihat dari kasus tersebut, Prakoso menilai bahwa tindakan Direksi PTDI yang memberikan fee kepada mitra penjualannya itu telah menimbulkan biaya lebih besar terhadap harga unit helikopter yang dibeli oleh Kemenhan (dengan dana APBN). Sedangkan Kemenhan seharusnya dapat membeli langsung ke PTDI (BUMN di dalam negeri) tanpa adanya perantara atau mitra penjualan. Karena diduga harga

yang ditawarkan ke Kemenhan sudah termasuk biaya fee untuk mitra penjualan PTDI. Bahwa kemudian adanya perbedaan besar biaya fee yang ditetapkan PTDI untuk mitra penjualannya seharusnya tidak terjadi. Karena PTDI semestinya memilih mitra penjualan yang menetapkan fee lebih rendah, terlebih untuk produk yang sama, tegasnya. Lantaran tindakan Direksi PTDI itu patut diduga telah memberi keuntungan kepada orang lain, atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara. Kasus yang telah menyebabkan kerugian negara dan diduga telah terjadi tindak pidana korupsi Maka Direksi PTDI dijerat dengan pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5 angka 4 juncto Pasal 21 UU 28/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (Ferry Hidayat, 2017)

Setiap perusahaan tidak menginginkan adanya tindak kecurangan dalam menjalankan usahanya. Seperti menangani penyakit, lebih baik mencegahnya daripada mengobatinya. Oleh karena itu, upaya utama yang seharusnya dilakukan adalah pada pencegahannya. Untuk mencegah terjadinya fraud pada suatu perusahaan perlu melakukan pengendalian internal (Tunakotta, 2016:271).

Pengendalian internal yaitu sebuah proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, direksi, manajemen dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar atas tercapainya tujuan organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut pengendalian internal sifatnya dinamis, tidak hanya berada pada satu waktu saja, tetapi akan berada sepanjang proses berlangsungnya aktivitas operasi. (Yayasan Pendidikan Internal Audit, 2015)

Mencegah tindakan kecurangan (*fraud*), Perusahaan harus memiliki pengendalian internal yang kuat. Pengendalian internal dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membangun organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, mengukur sumber daya suatu organisasi, selain itu berperan penting mencegah dan mendeteksi terjadinya *fraud* (Sukadwilinda, 2013).

Penelitian terkait pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan yang telah dilakukan sebelumnya yang dilakukan oleh Bagus Ida Dwika Maliawan, dkk (2017) dengan judul “Pengaruh Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)” menunjukkan bahwa audit internal dan efektivitas pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Zarlis Dwi (2016) dengan judul “Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Di Rumah Sakit” menunjukkan bahwa pengendalian internal memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud* di rumah sakit.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat kecurangan berupa pencurian sparepart yang dilakukan pihak internal PT Dirgantara Indonesia.
2. Adanya kerugian sebesar Rp5.426.864.685 yang dialami perusahaan akibat pencurian 19 sparepart yang dilakukan oleh pihak internal PT Dirgantara Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kecurangan (Fraud)

Menurut Karyono (2013:4) pengertian *fraud* adalah sebagai berikut:

“*Fraud* dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna serta penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain”.

Menurut Tuanakotta (2014:319) kecurangan didefinisikan sebagai berikut:

“Kecurangan adalah perbuatan yang disengaja oleh satu atau beberapa orang dalam manajemen, TCWG (*those charged with governance*), pegawai, atau pihak ketiga, dengan menipu untuk memperoleh keuntungan yang tidak dapat dibenarkan atau keuntungan yang tidak sah/melawan hukum”.

Berdasarkan definisi di atas, kecurangan (*fraud*) merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan menipu, berbuat curang dan memberikan gambaran keliru yang dapat dilakukan oleh orang dalam atau oleh orang dari luar organisasi.

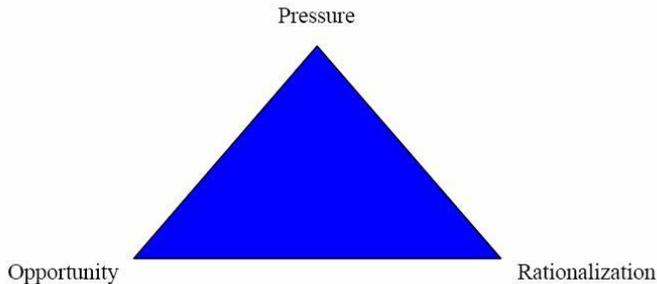
Jenis-jenis Kecurangan (Fraud)

Menurut *Examination Manual 2006* dari *Association of Certified Fraud Examiner*, kecurangan (*fraud*) dalam Karyono (2013:17) mengkategorikan kecurangan terdiri dari atas empat kelompok besar yaitu:

1. Kecurangan Laporan Keuangan (*Fraudulent Statement*) yang terdiri atas Kecurangan Laporan Keuangan dan Kecurangan Laporan Lain.
2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*) yang terdiri atas Kecurangan Kas dan Kecurangan Persediaan dan Aset Lain.
3. Korupsi (*Corruption*) yang terdiri atas Pertentangan Kepentingan, Penyipuan, Hadiah Tidak Sah, dan Aset Lain.
4. Kecurangan yang berkaitan dengan komputer.

Motivasi Kecurangan (Fraud)

Menurut Dr. Donald Cressy dalam Karyono (2013:8) teori segitiga fraud didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Tiga unsur itu digambarkan dalam segitiga sama sisi karena bobot/deraja ketiga unsur itu sama.



Gambar Segitiga Kecurangan

1. Tekanan (*pressure*)
Dorongan untuk melakukan *fraud* terjadi pada karyawan dan oleh manajer dan dorongan itu terjadi antara lain karena:
 - a. Tekanan keuangan: antara lain berupa banyak hutang, gaya hidup melebihi kemampuan keuangan (besar pasak daripada tiang), keserakahan, dan kebutuhan yang tidak terduga.
 - b. Kebiasaan buruk: antara lain kecanduan narkoba, judi, dan peminum minuman keras.
 - c. Tekanan lingkungan kerja: seperti kurang dihargainya prestasi/kinerja, gaji rendah dan tidak puas dengan pekerjaan.
 - d. Tekanan lain: seperti tekanan dari istri/suami untuk memiliki barang-barang mewah.
2. Kesempatan (*Opportunity*)
Kesempatan timbul terutama karena lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi, dan ketidak mampuan untuk menilai kualitas kinerja. Di samping itu tercipta beberapa kondisi lain yang kondusif untuk terjadinya tindakan kriminal, menurut Steve Albrecht, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesempatan untuk melakukan fraud yaitu:
 - a. Kegagalan untuk menertibkan pelaku kecurangan.
 - b. Terbatasnya akses terhadap informasi.
 - c. Ketidaktahuan, malas, dan tidak sesuai dengan kemampuan pegawai.
 - d. Kurangnya jejak audit.
3. Pembenaran (*Rationalization*)
Pelaku kecurangan mencari pembenaran antara lain:
 - a. Pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal biasa/wajar dilakukan oleh orang lain pula.
 - b. Pelaku merasa berjasa terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang telah diterimanya.

- c. Pelaku menganggap tujuannya baik yaitu untuk mengatasi masalah, nanti akan dikembalikan.

Pencegahan Kecurangan (Fraud)

Menurut Karyono (2013:61) dalam teori segitiga kecurangan (*triangel fraud*) faktor pendorong terjadinya kecurangan adalah tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Untuk mencegahnya diperlukan langkah-langkah untuk meminimalisir sebab terjadinya kecurangan yaitu:

1. Mengurangi “Tekanan” Situasional yang Menimbulkan Kecurangan
 - a. Hindari tekanan eksternal yang mungkin menggoda pegawai akunting untuk menyusun laporan keuangan yang menyesatkan.
 - b. Hilangkan hambatan operasional yang menahan kinerja keuangan yang efektif seperti pembatasan modal kerja.
 - c. Tetapkan prosedur akuntansi yang jelas dan seragam.
 - d. Hilangkan tekanan keuangan dengan penggajian yang memadai.
 - e. Ciptakan lingkungan kerja yang baik dengan menghargai prestasi kerja.
2. Mengurangi “Kesempatan” Melakukan Kecurangan.
 - a. Peningkatan pengendalian baik dalam rancangan struktur pengendalian maupun dalam pelaksanaannya.
 - b. Ciptakan catatan akuntansi yang akurat dan jelas dan berfungsi sebagai sarana kendali.
 - c. Pantau secara hati-hati transaksi bisnis dan hubungan pribadi pemasok dan pembeli.
 - d. Tetapkan pengamanan fisik terhadap aset dengan inventarisasi fisik secara berkala dan pengamanan lokasi/tempat penyimpanan.
 - e. Lakukan pemisahan fungsi di antara pegawai sehingga ada pemisahan otorisasi penyimpanan dan pencatatan.
 - f. Pelihara catatan personalia yang akurat dan lakukan pengujian latar belakang pegawai baru.
 - g. Penetapan sanksi tegas dan tanpa pandang bulu terhadap pelaku *fraud*.
 - h. Tetapkan sistem penilaian prestasi kerja yang adil.
3. Mengurangi “Pembenaran” Melakukan Kecurangan dengan Memperkuat Integritas Pribadi Pegawai
 - a. Ada aturan perilaku jujur dan tidak jujur harus didefinisikan dalam kebijakan organisasi.
 - b. Ada contoh perilaku jujur dari manajer dan berperilaku seperti apa yang mereka inginkan.
 - c. Ada aturan sanksi tugas dan jelas bila ada penyimpangan aturan bagi pelakunya.

Pengendalian Internal

Definisi sistem pengendalian internal menurut Mulyadi (2017:129) yaitu:

Sistem pengendalian internal yaitu meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikondisikan untuk menjaga kekayaan organisasi. Mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Sedangkan menurut Alvin A. Arens dkk (2008) sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan sasaran.

Berdasarkan pengertian pengendalian internal diatas, pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan organisasi, pengendalian internal dilaksanakan oleh setiap orang dari jajaran organisasi yang mencakup direksi, manajemen dan personel lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai.

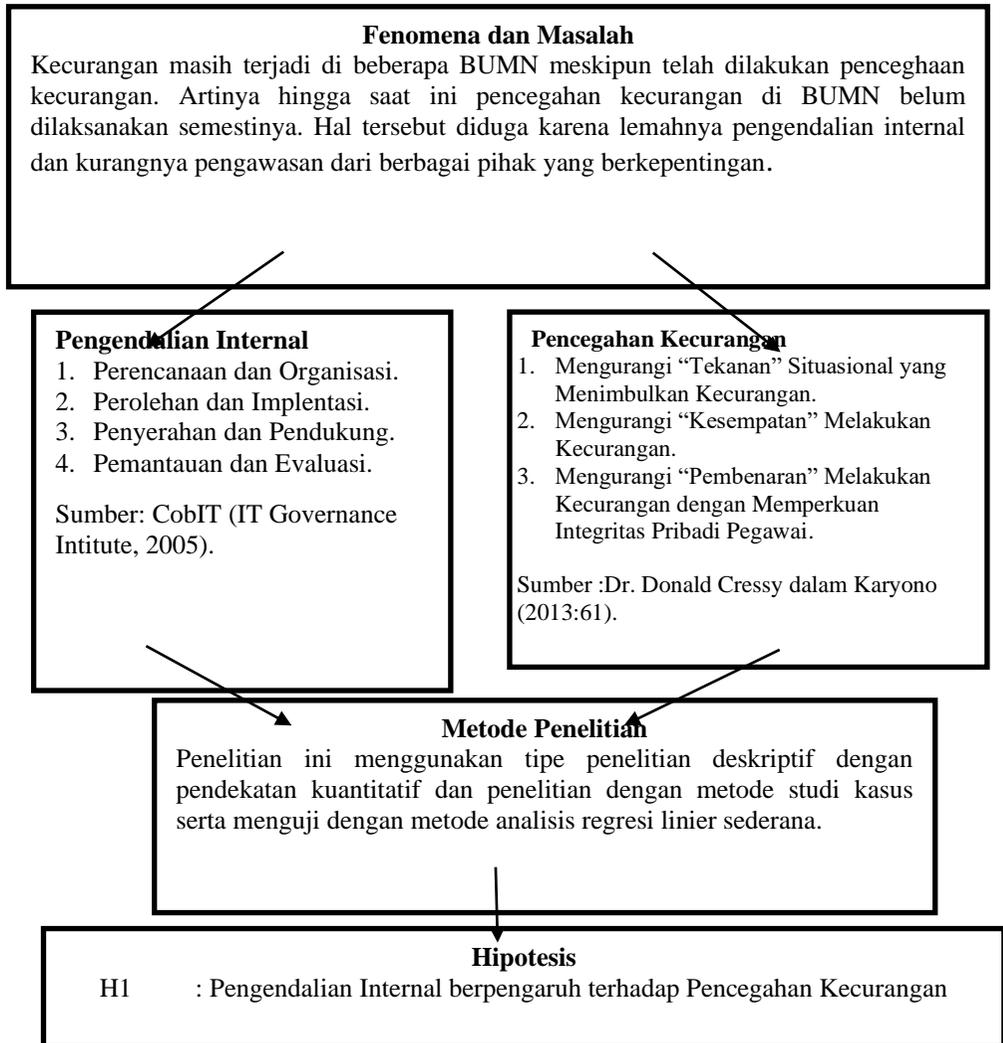
Kerangka Pemikiran

Tindakan kecuranga (*fraud*) cenderung meningkat oleh karena itu upaya pencegahan harus di dukung oleh seluruh pelaku organisasi baik oleh pihak manajemen ataupun seluruh karyawan yang berada di suatu organisasi tersebut. Pencegahan *fraud* merupakan aktivitas memerangi fraud yang paling efektif, sehingga harus didukung oleh seluruh pelaku organisasi. Kondisi penyebab terjadinya kecurangan (*fraud*) dapat disebabkan oleh adanya tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*). Untuk mencegah terjadinya kecurangan diperlukan langkah-langkah untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yaitu mengurangi “tekanan” situasional yang menimbulkan kecurangan, mengurangi “kesempatan” melakukan kecurangan, mengurangi “pembenaran” melakukan kecurangan dengan memperkuat integritas pribadi pegawai (Karyono, 2013).

Pengendalian menurut Standar Profesi Audit Internal dalam (Yayasan Pendidikan Internal Audit, 2015:25) adalah tindakan yang diambil oleh manajemen, dewan pengawas, atau pihak lain, termasuk komite audit, untuk mengelola risiko dan meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen melakukan tindakan-tindakan seperti perencanaan, suverivisi, pemantaun dan sebagiannya untuk memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian tujuan tersebut.

Komponen pengendalian internal menurut CobIT (2005) terdiri dari empat komponen yang terdiri dari perencanaan dan organisasi, perolehan dan implementasi, penyerahan dan pendukung, pemantauan dan evaluasi. Komponen pengendalian internal tersebut merupakan komponen yang saling berkaitan.

Pengendalian yang efektif akan dapat menjaga kekayaan perusahaan dari kesalahan pemanfaatan atau penyalahgunaan, menjaga integritas dan keandalan informasi keuangan dan operasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi, serta mendoorong ketaatan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku (Yayasan Pendiidkan Internal Audit, 2008:18)



Gambar Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan dari kerangka kerja pemikiran, maka penelitian dapat pula digambarkan dengan paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar Paradigma Penelitian

Hubungan Pengendalian Internal dengan Pencegahan Kecurangan

Sistem pengendalian internal meliputi sruktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian internal tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, pengertian pengendalian internal tersebut diatas berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer (Mulyadi, 2017:129).

Kecurangan (*fraud*) didefinisikan sebagai setiap tindakan ilegal yang bercirikan penipuan, menyembunyian, atau penyalahgunaan kepercayaan. Tindakan tersebut tidak terbatas pada ancaman atau pelanggaran dalam bentuk kekuatan fisik saja. Kecurangan dapat dilakukan oleh pihak-pihak dan organisasi untuk mendapatkan uang, aset, atau jasa untuk menghindari pembayaran atau kerugian atas jasa atau untuk memperoleh keuntungan pribadi atau bisnis (Internasional Professional Practices Framework, 2017). Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian internal berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi risiko kecurangan dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Karenanya organisasi harus memiliki pengendalian internal untuk menjaga agar operasi organisasi dapat secara efisien dan efektif mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus mengurangi risiko yang dihadapi organisasi (Yayasan Pendidikan Audit Internal, 2015:1).

Menurut K Dabbagolu (2012) *The effectiveness of the internal control which is an of the success in achieving the objectives is directly related to the fraudulent acts which occurred in the organization.* (Efektivitas pengendalian internal merupakan indikator dari keberhasilan dalam mencapai tujuan secara langsung berhubungan dengan tindakan penipuan yang terjadi dalam organisasi). Menurut Nisak Chairun, dkk (2013) indikator pengendalian internal yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan berepengaruh terhadap pencegahan fraud baik secara simultan maupun secara parsial.

Pengendalian internal yang dirancang secara sistematis dapat mencegah adanya kekeliruan dan ketidakberesan. Pencegahan terjadi apabila pengendalian tersebut dapat

mendeteksi adanya *fraud* pada suatu aktivitas tanpa menunggu adanya audit. (Karyono, 2013:51)

Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu:

H1 : Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2017:2). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan penelitian ini menggunakan metode studi kasus.

Menurut Nuryaman dan Veronica (2015:6) menyebutkan bahwa pengertian penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

“Penelitian deskriptif adalah penelitian tujuannya untuk memperoleh deskriptif atau gambaran tentang karakteristik tertentu (variabel tertentu) dalam suatu subjek yang sedang menjadi perhatian dalam kegiatan penelitian tersebut”.

Menurut Sugiyono (2017:9) mendefinisikan metode penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut:

“Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang diterapkan”.

Menurut Nuryaman dan Veronica (2015:83) studi kasus didefinisikan sebagai berikut:

“Studi kasus adalah studi yang lebih menitikberatkan pada kedalaman daripada keluasan. Studi ini lebih menekankan pada analisis konteks secara mendalam berdasarkan peristiwa atau situasi yang sedang berlangsung, serta mencari hubungan antar peristiwa lainnya”.

Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data, yakni subjek atau benda, maka data tersebut dinamakan data primer, dan sumber datanya dinamakan sumber data primer (Nuryaman dan Veronica, 2015:79). **Sumber data menyangkut letak keberadaan data penelitian yang diperlukan, data dapat berada pada siapa atau pada apa** (Nuryaman dan Veronica, 2015:78).

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai pernyataan tentang setuju atau tidak setujunya berkaitan dengan kuisioner yang diberikan kepada responden sebagai sumber data

Objek Penelitian

Objek penelitian menurut Nuryaman dan Veronica (5015:5) adalah karakteristik yang melekat pada subjek penelitian. Karakteristik ini jika dibernilai maka nilainya akan bervariasi antarindividu satu dengan yang lainnya. Objek penelitian sering juga disebut sebagai variabel penelitian.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengendalian internal sebagai variable X dan pencegahan kecurangan sebagai variable Y.

Populasi Penelitian

Menurut Nuryaman dan Veronica (2015:101) mendefinisikan populasi menunjukkan seluruh kelompok orang, kejadian atau sesuatu yang menjadi ketertarikan penelitian untuk diinvestigasi. bisa juga dikatakan bahwa populasi merupakan total kumpulan elemen yang dari dari kumpulan tersebut akan dibuat kesimpulan.

Sedangkan menurut Sugiyono (2017:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Tabel Populasi

Divisi	Jumlah Orang
Satuan Pengawas Intern	13
Akuntansi	23
Pembendaharaan	20
Manajemen logistic	31
Jasa material dan fasilitas	21
Total	108

Sampel Penelitian

Menurut Nuryaman dan Veronica (2015:101) pengertian sampel adalah bagian dari populasi, sampel berisi beberapa anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain yang membentuk sampel hanyalah beberapa elemen populasi saja, bukan seluruh elemen.

Sedangkan menurut (Sugiyono, 2017:81) pengertian Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.

Menurut Sugiyono (2017:81) sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representative atau mewakili. Bila sampel tidak representatif, maka akan mengakibatkan pengambilan kesimpulan yang salah tentang objek yang diteliti.

Pada penelitian ini untuk memperoleh sampel dari populasi tersebut akan digunakan teknik *nonprobability sampling*. *Nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. (Sugiyono, 2017:84).

Untuk menghitung jumlah sampel dari populasi tertentu, maka digunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Keterangan:

n : sampel
N : populasi
e : taraf kesalahan

pengambilan sampel ini dilakukan pada tingkat keyakinan 95% atau nilai kritis 5% sehingga ukuran sampel dapat dihitung sebagai berikut:

$$n = \frac{108}{1 + 108(5\%^2)} = 85,04$$

Berdasarkan perhitungan diatas tersebut maka sampel yang diambil sebanyak 85 (dibulatkan). Untuk penyebaran sampel pada tiga divisi tersebut dapat digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Sampel} = \frac{\text{Jumlah Populasi}}{\text{Populasi}} \times \text{Sampel}$$

Tabel Pembagian Sampel

Divisi	Populasi	Perhitungan	Pembagian Sampel (Dibulatkan)
Satuan Pengawas Intern	13	$\frac{13}{108} \times 85 = 10,23$	10
Akuntansi	23	$\frac{23}{108} \times 85 = 18,10$	18
Pembendaharaan	20	$\frac{20}{108} \times 85 = 15,74$	16
Manajemen logistic	31	$\frac{31}{108} \times 85 = 24,39$	15
Jasa material dan fasilitas	21	$\frac{21}{108} \times 85 = 16,53$	17
Total Sampel			85

Metode Pengumpulan Data

Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka dapat dilakukan dengan wawancara (*interview*), menyebar kuesioner (angket), observasi (pengamatan), maupun gabungan ketiganya (Sugiyono, 2017:137).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara berhubungan langsung dengan objek yang diteliti. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung terhadap objek yang diteliti dengan melakukan:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit atau kecil (Sugiyono, 2017:137).

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang dapat diharapkan dari responden (Sugiyono, 2017:142).

c. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak terbatas pada orang saja, tetapi juga pada objek-objek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2017:145)

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dengan mempelajari bahan-bahan teoritis, buku-buku literature, jurnal-jurnal dan catatan selama perkuliahan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti guna memperoleh teori-teori untuk melengkapi data yang diperlukan.

3. Riset Internet (*Online Research*)

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang berasal dari situs-situs terkait guna memperoleh tambahan literature atau data relevan dan terpercaya yang dibutuhkan oleh penulis.

Instrumen Penelitian

Alat ukur dalam suatu penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Menurut Sugiyono (2017:102) instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian.

Dalam penelitian ini, instrument penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden (Sugiyono, 2017:142)

Operasional Variabel

Menurut Nuryaman dan Veronica (2015:52) mendefinisikan variabel secara operasional adalah menggambarkan/mendeskripsikan variabel penelitian sedemikian rupa, sehingga

variabel tersebut bersifat spesifik (tidak berinterpretasi ganda) terukur (*observable dan measurable*).

Operasional variabel dilakukan dengan cara mengamati dimensi, sisi-sisi, ciri-ciri perilaku dari suatu konsep, kemudian menterjemahkannya dalam elemen-elemen yang dapat diobservasi dan diukur agar dapat dibuat atau dikembangkan indeks pengukuran dari konsep-konsep tersebut (Nuryaman dan Veronica, 2015:90).

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dengan penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara sesuai dengan judul penelitian.

Sesuai dengan judul yaitu “Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan” maka variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Independent

Menurut Nuryaman dan Veronica (2015:42) mendefinisikan variabel independen atau disebut juga variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Dengan kata lain, perubahan nilai (*variance*) pada variabel independen dapat menyebabkan perubahan nilai variabel dependen. Dengan demikian dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah pengendalian internal. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengendalian Internal yang dilambangkan dengan X.

2. Variabel Dependent

Menurut Nuryaman dan Veronica (2015:42) mendefinisikan variabel dependen atau disebut juga variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dengan kata lain, besaran nilai variabel dependen dipengaruhi oleh perubahan nilai variabel independen. Dengan demikian pula dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah pencegahan kecurangan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pencegahan Kecurangan yang dilambangkan dengan Y.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Regresi linier sederhana dapat digunakan untuk memprediksi hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independensi dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2017:188) analisis regresi selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, juga menunjukkan arah hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen. Persamaan umum regresi linier sederhana adalah:

$$\hat{Y} = a + bX$$

Keterangan :

- \hat{Y} = Nilai yang di prediksi
- a = Konstan atau bila harga $X=0$
- b = Koefisien regresi
- X = Nilai variabel independen

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji validitas setiap butir pertanyaan dalam instrument kuesioner yang digunakan. Pengujian dikatakan valid apabila nilai *Corrected Item Total Correlation* yang merupakan r_{hitung} dari setiap butir pertanyaan harus lebih besar dari nilai r_{tabel} .

Uji validitas dalam penelitian ini dianalisis menggunakan *Degree of Freedom* (df) dengan rumus $df = n-2$, dengan tekanan keyakinan sebesar 95%. Nilai n menunjukkan jumlah responden yang diteliti dalam penelitian ini yaitu sebanyak 30 responden. Sehingga nilai df adalah $85-2 = 83$. Tekanan keyakinan yaitu 95% dan df 83 kemudian untuk mencari t_{tabel} :

$$t_{tabel} = \text{Inv}(\text{prob}, df) \\ = \text{Inv}(0.05; 83), \text{ maka diperoleh } t_{tabel} = 1,99$$

Selanjutnya cari nilai r_{tabel} dengan memasukkan nilai df dan nilai t_{tabel} yang telah diperoleh ke rumus berikut ini:

$$r_{tabel} = \frac{t}{\sqrt{df + t^2}} \\ r_{tabel} = \frac{1,99}{\sqrt{83 + 1,99^2}} = 0,213$$

Dasar pengambilan keputusan untuk uji validitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Jika $r_{hitung} \geq 0.213$, maka butir pertanyaan tersebut valid.
- Jika $r_{hitung} < 0.213$, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.

Berikut ini hasil uji validitas:

Tabel Hasil Uji Validitas Pengendalian Internal

Item	r korelasi	r kritis	Keterangan
P1	0.514	0.213	Valid
P2	0.426	0.213	Valid
P3	0.419	0.213	Valid
P4	0.572	0.213	Valid
P5	0.369	0.213	Valid
P6	0.480	0.213	Valid
P7	0.556	0.213	Valid
P8	0.713	0.213	Valid
P9	0.683	0.213	Valid
P10	0.592	0.213	Valid
P11	0.679	0.213	Valid

P12	0.569	0.213	Valid
P13	0.501	0.213	Valid
P14	0.432	0.213	Valid

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel uji validitas variabel pengendalian internal dapat dikatakan valid karena skor total positif dan besarnya 0,213 ke atas dan bernilai positif, artinya pernyataan yang hendak digunakan untuk mengukur variabel tersebut sudah tepat. (Sugiyono, 2017:125)

Tabel Hasil Uji Validitas Pencegahan Kecurangan

Item	r korelasi	r kritis	Keterangan
P1	0.550	0.213	Valid
P2	0.574	0.213	Valid
P3	0.643	0.213	Valid
P4	0.774	0.213	Valid
P5	0.699	0.213	Valid
P6	0.562	0.213	Valid
P7	0.500	0.213	Valid
P8	0.656	0.213	Valid
P9	0.578	0.213	Valid
P10	0.650	0.213	Valid
P11	0.836	0.213	Valid
P12	0.740	0.213	Valid
P13	0.844	0.213	Valid
P14	0.804	0.213	Valid
P15	0.761	0.213	Valid
P16	0.786	0.213	Valid

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 5.5 uji validitas variabel pencegahan kecurangan dapat dikatakan valid karena skor total positif dan besarnya 0,213 ke atas bernilai positif, artinya pertanyaan yang hendak digunakan untuk mengukur variabel tersebut sudah tepat. (Sugiyono, 2017:125).

Hasil Uji Reabilitas Instrumen

Uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah pengukuran yang telah dilakukan menghasilkan jawaban yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Maksudnya, suatu konsistensi alat ukur dalam menghasilkan data, disebut konstan apabila data hasil pengukuran dengan alat yang sama dan berulang-ulang menghasilkan data yang relatif sama. Pengambilan keputusannya adalah dengan melihat dari nilai *Cronbach's Alpha*. Menurut (Sugiyono, 2017:130), jika nilai *Cronbach's Alpha* > dari nilai r_{tabel} yaitu 0.60 maka pengujian variabel tersebut dapat dikatakan reliabel.

Tabel Reabilitas Variabel Pengendalian Internal
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.871	14

Sumber : Hasil output SPSS

Dari tabel di atas nilai reliabilitas variabel pengendalian internal sebesar 0,871, karena r berada > 0,60, maka variabel pengendalian internal sudah memenuhi kriteria reliabel. Sedangkan hasil pengujian reliabilitas variabel pencegahan kecurangan sebagai berikut:

Tabel Reabilitas Variabel Pencegahan Kecurangan
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.942	16

Sumber : Hasil output SPSS

Dari tabel di atas nilai reliabilitas variabel pendeteksian kecurangan sebesar 0,942, karena r berada > 0,60, maka variabel pendeteksian kecurangan sudah memenuhi kriteria reliabel.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Persamaan regresi adalah analisis statistik yang digunakan untuk memprediksikan pengaruh variable pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan

Tabel Persamaan Regresi (Coefficients)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.246	5.597		.044	.965
	X	1.049	.104	.741	10.064	.000

Sumber : Hasil output SPSS

Berdasarkan tabel 5.19, diketahui nilai persamaan regresi linier adalah sebagai berikut:

$$Y = 0.246 + 1.049X$$

Di mana:

a = 0.246 memiliki arti bahwa, apabila variabel pengendalian internal sama dengan nol atau

konstan, maka pencegahan kecurangan memiliki nilai sebesar = 0.246 satuan.

b = 1.049 artinya adalah jika pengendalian internal mengalami peningkatan sebesar satu satuan,

maka nilai variabel pencegahan kecurangan akan diprediksikan akan mengalami peningkatan

sebesar **1.049** satuan.

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui variable independen (X) secara parsial berpengaruh terhadap variable dependen (Y). Dalam hal ini, dilakukan uji t untuk mengetahui apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Dasar keputusan :

- a. Berdasarkan nilai signifikansi
 1. Jika nilai sig. $< 0,05$, maka hipotesis diterima, atau ada pengaruh antara variable independen (X) terhadap variable dependen (Y).
 2. Jika nilai sig. $> 0,05$, maka hipotesis ditolak, atau tidak ada pengaruh variable independen (X) dengan variable dependen (Y).
- b. Berdasarkan perbandingan nilai t hitung dengan t table
 1. Jika nilai $t_{hitung} > t_{table}$, maka ada pengaruh variable independen (X) terhadap variable dependen (Y).
 2. Jika nilai $t_{hitung} < t_{table}$ maka, tidak ada pengaruh variable independen (X) terhadap variable dependen (Y).

Tabel Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji T)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.246	5.597		.044	.965
	X	1.049	.104	.741	10.064	.000

Sumber : Hasil output SPSS

Berdasarkan tabel 5.20 dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai sig. sebesar $0.000 < 0,05$, maka terdapat pengaruh antara pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (Y).
- b. Nilai t hitung yang didapat sebesar $10.064 > t_{table} 1.99$ maka terdapat pengaruh antara pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (Y).

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel Koefisien Determinansi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.741 ^a	.550	.544	7.65063

Sumber : Hasil output SPSS

Berdasarkan tabel mengenai koefisien determinansi, maka diketahui nilai determinasi atau *R Square* sebesar 0.550. Nilai *R Square* tersebut sama dengan 55%. Nilai tersebut berarti bahwa variable pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan sebesar 55.0%. Sedangkan sisanya yaitu 45% dipengaruhi variable lain yang tidak diteliti.

Pengujian Analisis Korelasi Perason

Analisis ini digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara pengendalian internal dengan pencegahan kecurangan. Penafsiran penilaian hubungan korelasi atau seberapa besarnya pengaruh variabel – variabel tidak bebas, digunakan pedoman yang dikemukakan Sugiyono (2017:184) seperti tertera pada tabel sebagai berikut:

Tabel Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tekanan Hubungan
0.000 – 0.199	Sangat Rendah
0.200 – 0.399	Rendah
0,400 – 0.599	Sedang
0.600 – 0.799	Kuat
0.800 – 1.000	Sangat Kuat

**Tabel Pengujian Analisis Korelasi Pearson
Correlations**

		X	Y
X	Pearson Correlation	1	.741**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	85	85
Y	Pearson Correlation	.741**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	85	85

Sumber : Hasil Output SPSS

Berdasarkan pada tabel 5.20, diketahui nilai korelasi sebesar 0.741 berada pada kriteria 0.600 – 0.799, maka diartikan variable pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan mempunyai tekanan hubungan yang kuat.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Tanggapan responden pada variabel pengendalian internal berada pada kriteria baik. Indikator penyerahan dan pendukung memiliki tanggapan responden terendah, sedangkan indikator perencanaan dan organisasi memiliki tanggapan responden yang tertinggi.
- 2 Tanggapan responden pada variabel pencegahan kecurangan berada pada kriteria baik. Indikator Mengurangi Kesempatan Melakukan Kecurangan memiliki tanggapan responden terendah, sedangkan Indikator mengurangi tekanan situasional yang menimbulkan kecurangan memiliki tanggapan responden yang tertinggi.
- 3 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Kota Bandung.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan pengendalian internal dan pencegahan kecurangan termasuk ke dalam kategori baik, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang harus dibenahi. Maka penulis bermaksud mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Saran PT. Dirgantara Indonesia

Untuk meningkatkan pencegahan kecurangan maka sebaiknya perusahaan:

- 1) Meningkatkan pengendalian internal dengan cara, meningkatkan aktivitas penilaian risiko seperti mengidentifikasi dan menganalisis risiko organisasi secara menyeluruh, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap adanya potensi terjadinya kecurangan. Meningkatkan aktivitas pemantauan dengan melakukan evaluasi terhadap setiap aktivitas organisasi secara berkala, dan menyampaikan secara tepat waktu jika ditemukan kelemahan pada sistem pengendalian intern agar segera melakukan tindakan korektif. Mengawasi sistem sanksi mengenai pelanggaran aturan dan memberikan hukuman yang tegas sesuai dengan peraturan. Mengawasi semua aktivitas yang ada dalam perusahaan seperti dokumen transaksi dan penggunaan aset. Memeriksa ulang informasi yang ada agar ketika dibutuhkan informasi tersebut relevan dan dapat diandalkan.
- 2) Meningkatkan pencegahan kecurangan dengan cara, melakukan pemisahan fungsi tugas dan sistem kaji ulang untuk mendeteksi kecurangan secara dini,

seperti dilakukannya pembagian tugas yang berbeda pada masing-masing karyawan agar dapat bertanggung jawab pada tugasnya dan tidak mengganggu kegiatan satu sama lain. Menghilangkan hambatan operasional seperti pembatasan modal yang dapat menahan efektifitas kinerja keuangan perusahaan. Menciptakan beberapa usaha untuk mengawasi pencatatan, membuat sistem pengendalian fisik secara langsung, dan melakukan kegiatan review terhadap semua kegiatan transaksi. Melaksanakan sistem penggajian secara tepat waktu agar hambatan keuangan dapat dihindari, serta memberikan memberikan reward sesuai dengan prestasi kerja pegawai yang dinilai secara objektif.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya disarankan yaitu sebagai berikut :

- 1) Diharapkan untuk peneliti selanjutnya tidak terpaku hanya pada faktor-faktor dalam penelitian ini yaitu pengendalian internal, namun dapat menambah faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan seperti halnya faktor audit internal, profesionalisme audit internal, manajemen risiko, pelaksanaan kualitas audit, *wistleblowing system* dan faktor lainnya.
- 2) Agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara luas, maka untuk peneliti selanjutnya diharapkan subjek penelitian tidak hanya terpaku pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Kota Bandung, namun dapat menggunakan subjek penelitian lainnya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Arens, Alvin A., Elder, dan Beasley. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegritasi*. Jilid 1. Edisi 12. Jakarta: Erlangga.
- [2]. Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Delapan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [3]. Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Andi.
- [4]. Kumaat, Valery G. 2011. *Internal Audit*. Jakarta: Erlangga.
- [5]. Mulyadi. 2014. *Auditing*. Edisi Keenam, Cetakan Pertama. Bandung : Salemba Empat.
- [6]. Nuryaman, dan Veronica Christina. 2015. *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis*. Bogor. Penerbit Ghalia Indonesia.
- [7]. Payadnya, I Putu Ade Andre & I Gusti Agung Nugraha Trisna Jayantika. 2018. *Panduan Penelitian Eksperimen Beserta Analisis Statistika Dengan SPSS*. Yogyakarta: Anggota IKAPI.
- [8]. Riduwan, & Kuncoro. 2017. *Cara Menggunakan dan Memaknai Path Analysis (Analisis Jalur)*. Bandung: Alfabeta.
- [9]. Sekaran, Uma, and Bougie. 2011. *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian*. Jakarta: Salemba empat.
- [10]. Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [11]. Tuanakotta, Theodorus M. (2014). *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta : Salemba Empat.

- [12]. Tuanakotta, Theodorus M. (2016). *Audit Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- [13]. Yayasan Pendidikan Internal Audit. 2008. *Fondasi Audit Internal*. Jakarta
- [14]. Yayasan Pendidikan Internal Audit. 2015. *Fondasi Audit Internal*. Jakarta
- [15]. Peraturan dan Undang-undang
- [16]. Kemenkeu. 2003. *Badan Usaha Milik Negara*. Dikutip dari <https://jdih.kemenkeu.go.id>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2020.
- [17]. Internet
- [18]. ACFE Indonesia. 2017. *Survai Fraud Indonesia 2016*. Dikutip dari <https://acfe-indonesia.or.id>. Diakses pada tanggal 26 Februari 2020.
- [19]. Agus. 2019. SINDONEWS.COM. 03 Oktober. <https://jabar.sindonews.com/read/10950/1/curi-suku-cadang-pesawat-5-eks-karyawan-ptdi-diseret-ke-meja-hijau-1570119030>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2020.
- [20]. Bagus, Ida Dwika Maliawan, dkk. 2017. Pengaruh Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*). *e-Jurnal SI Ak*. Vol.8 No.2. Universitas Pendidikan Ganesha.
- [21]. Dabbagoglu, K. 2012. *Fraud in Businesses and Internal Control System Journal*. T.C Halic University. Istanbul, Turkey.
- [22]. Diana, Sari. 2012. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. ISSN-2251-3936. Universitas Widyatama.
- [23]. Dimitrijevic, Dragomir, Vesna Milovanovic, Vladimir Stancic. 2015. The Role of A Company Internal Control System In Fraud Prevention. *Financial Internet Quarterly*. e-Finance. 11:34-44
- [24]. Dwi, Zarlis. 2018. Pengaru Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Di Rumah Sakit. *Jurnal Transparansi*. Vol.1 No.2. STIE Kusuma Negara.
- [25]. Ferry, Hidayat. 2017. *Warta Ekonomi*. 09 Maret. <https://www.wartaekonomi.co.id/read133384/kpk-didesak-usut-korupsi-di-ptdi>. Diakses pada tanggal 6 mei 2020.
- [26]. Fitroh, Nurani dan Evi Octavia. 2016. Pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol.8 No.1. Universitas Widyatama.
- [27]. Internasional Professional Practices Framework (IPPF). 2017. *Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal*. <https://na.theiia.org>. Diakses pada tanggal 8 November 2019.
- [28]. *IT Governance Institute*. 2005. *Cobit 4.0*. Dikutip dari www.itgi.org. Diakses pada tanggal 28 Maret 2020.
- [29]. Joseph, ON. dkk 2015. *Effect of Internal Control on Fraud Prevention. Journal*. Masinde Muliro University of Science and Technology. Kenya.
- [30]. Lucky, M Lukman. 2019. GALAMEDIANEWS.com. 05 Desember. <https://www.galamedianews.com/?arsip=241043&judul=curi-sparespart-pesawat-oknum-karyawan-pt-di-dihukum-10-bulan-2-5-tahun-bui>. Diakses pada tanggal 30 Februari 2020.

- [31]. Mimin, Widaningsih. 2015. Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*). *Jurnal Riset akuntansi dan Keuangan*. Vol.3 No.1. Universitas Pendidikan Indonesia.
- [32]. Nisak, Chairun, dkk (2013). Sistem Pengendalian Intern Dalam Pencegahan Fraud Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Kabupaten Bangkalan. *JAFFA*. Vol. 01 No. 1. Universitas Trunojoyo Madura.
- [33]. Pratomo Cahyo Kurniawan dan Khairina Nur Izzaty. 2019. Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*. *Journal of Economics and Banking*. Vol.1 No.1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng.
- [34]. Reiny, Dwinanda. 2019. REPUBLIKA.co.id. 03 Oktober. <https://m.republika.co.id/berita/pysyd9414/curi-suku-cadang-pesawat-lima-karyawan-ptdi-diadili>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2020.
- [35]. Rini Susiani dan Acep Edison. 2017. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal. *Jurnal Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice*. Universitas Widyatama.
- [36]. Soleman, Rusman. 2013. Pengaruh Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud*. *JAAI*. Vol 17 No.1. Universitas Khairun Ternate.
- [37]. Suginam. 2017. Pengaruh Peran Audit Internal dan Pengendalian Intern terhadap Pencegahan Fraud. *Riset dan Jurnal Akuntansi*. Vol.1 No.1. STMIK Budi Darma.
- [38]. Sukadwilinda, R Aryanti Ratnawati. (2013). Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)* Vol. 5 No. 1. Universitas Pendidikan Indonesia.
- [39]. Wyana Oktaviani, Hendra Ginawan, Harlianto Utomo. 2015. Pengaruh Pengendalian Internal dalam Mencegah Kecurangan. *Jurnal ekonomi-Akuntansi*. Universitas Islam